

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Amelia Putri, F. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggalan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Timur. Repository UIN Jakarta. Link PDF
- Anderson, C., & Claassen, B. (2020). Enforcement approach and human compliance behavior: Limiting choice to increase rule adherence. *Journal of Behavioral Regulation*, 15(2), 87–102.
- Antara (2025). KPP Pratama Kendari catat 72 ribu wajib pajak telah lapor SPT. Antara [Online]. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4769441/kpp-pratama-kendari-catat-72-ribu-wajib-pajak-telah-lapor-spt> pada 14 April 2025
- Asriyana, A., Mursalim, M., & Nurwanah, N. (2023). Analisis penagihan aktif surat teguran, surat paksa dan penyitaan oleh jurusita pajak dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(2), 70–71. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jaf/article/view/1858/2167>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Disimpan di Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Faiz, R., & Subekti, D. (2022). Kendala dalam penagihan pajak dengan surat paksa: Studi pada KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 5(1), 74-89.
- Fiorio, C. V., & Santoro, A. (2023). Tax enforcement activities: Evidence on the impact of a threat of audit letter. *Economic and Political Studies*, 11(2), 139–157. https://fiorio.economia.unimi.it/wp-content/uploads/2023/08/Fiorio_Santoro_2023_Tax-enforcement-activities-Evidence-on-the-impact-of-a-threat-of-audit-letter.pdf



- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (edisi ke-5). McGraw-Hill.
- Harahap, F. H., Rais, R. G. P., Razif, R., & Khaddafi, M. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). Jurnal Ekonomi dan Perpajakan. Link PDF
- Harjo, S., Nugroho, T., & Putra, D. (2023). Evaluasi efektivitas pemblokiran rekening dalam penagihan pajak PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Selatan. Jurnal Hukum dan Perpajakan, 16(2), 78-92.
- Hartono, J. (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Hery. (2018). Akuntansi Dasar. Jakarta: Grasindo.
- Husein Umar. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Ibnu Hajar. (1996). Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Gramedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan – IAI.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2024. Direktorat Jenderal Pajak [Online]. Diakses dari <https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/LAKIN%202024%20KPP%20PRATAMA%20KENDARI.pdf> pada 22 Juni 2025.
- KBBI Daring. (2024). Pencairan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2023). Target Penerimaan Pajak 2024 Rp2.307,9 Triliun. Kementerian Keuangan RI [Online]. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Target-Penerimaan-Pajak-2024-Rp2-307,9-Triliun> pada 16 Juni 2025.



rian Keuangan Republik Indonesia, (2024). Statistik Penerimaan Pajak tahun 2023 dalam Angka. Direktorat Jenderal Pajak [Online]. Diakses dari [tps://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka](https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka) pada 22 Juni 2025.

- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behavior*. Cambridge University Press.
- Kurniawati, A., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*
- MacKinnon, D. P., Cox, S., & Baraldi, A. N. (2012). Guidelines for the investigation of mediating variables in business research. *Journal of Business and Psychology*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1007/s10869-011-9248-z>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Millatina, A. (2025). Analisis efektivitas pemblokiran rekening dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia: Studi pada KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 10(3), 112-125.
- Munazat, A., (2024). Shortfall: Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Hanya Capai 97,2% dari Target. *MUC Insight* [Online]. Diakses dari <https://muc.co.id/id/article/shortfall-realisisasi-penerimaan-pajak-2024-hanya-capai-972-dari-target> pada 22 Juni 2025.
- Muslim, F., Wulandari, D., & Sari, P. R. (2024). The impact of tax audit intensity and probability of fraud detection on tax evasion: The moderating role of tax officials' service. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(3), 45–56.
- Nunnally, J.C. (1994). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Pajakku.com, 2025. Wamenkeu Beberkan Penyebab Target Penerimaan Pajak 2024 Rp2.307,9 Triliun Tak Tercapai. *Pajakku.com* [Online]. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Target-Penerimaan-Pajak-2024-Rp2-307,9-Triliun> pada 16 Juni 2025.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar* (hal. 2). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ditetapkan 9 Juni 2023; diundangkan 12 Juni 2023. Diakses melalui JDIH Kementerian Keuangan
- Perkoppi. (2022). Direktorat Jenderal Pajak Telah Mencatat Atas Tingkat Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak.
- Putra, E. D. and Rahayu, N. (2023). Praktik-praktik tax avoidance serta penerapan kebijakan anti-tax avoidance di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 524.



A., Muslim, A. I.. (2022). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Jrat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Review of Applied Accounting Research* 2(2), 193–206.

- Putra, M. L. B. (2021). Pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak: Studi kasus pada KPP Pratama Sleman [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. DSpace UII. 12(1), 1–60
- Putri, K. A., & Fitriandi, P. (2025). Analisis pemblokiran rekening sebagai upaya pencairan piutang pajak di KPP Pratama Batam Selatan. JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 8(1), 1-24.
- Rahmawati, I., & Handayani, S. (2023). Pengaruh surat paksa terhadap peningkatan kepatuhan pajak di sektor PPh Badan. Jurnal Pajak Indonesia, 14(2), 124-135.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menggunakan metode mix method (pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). Kajian Ekonomi dan Bisnis, 15(1), 95–109.
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> [22 Juni 2025].
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suandy, E. (2018). Hukum pajak (Edisi ke-7). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulastri, R. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Makassar. Repository UNIBOS.
- Suherman, E., Sari, R. P., & Wulandari, D. (2024). Analisis Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan PPh OP di KPP Pratama Demak. Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 1(3), 139–144
- H., & Ardiana, I. (2021). Peran penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak di daerah. Jurnal Perpajakan Indonesia, 8(4), 213-226.



- Waldhania, S., Haryadi, B., & Suradi, H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kepatuhan pajak di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 12(3), 80-92.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Wertheimer, A. (2018). Threats, offers, and coercion in regulatory compliance. *Journal of Ethics and Social Philosophy*, 13(1), 45–67.
- Wijaya, S., & Ariyani, D. R. S. (2021). Alternatif upaya penagihan pajak melalui pemblokiran kartu kredit (suatu tinjauan). *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(2), 88–102.
- Wijayanti, A., & Fitriandi, M. (2022). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Banjarbaru pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 10(1), 45-59.
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2023). Analisis Realisasi Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 1(2), 105–113. Diakses dari <https://journal.aaipadang.com/jrapa>

